

DAFTAR PUSTAKA

- Artari, N. P. G. S., Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Unud*. 7(2). 1080-1110.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*. 3(1). 64-75.
- Hasan, S. (2018). Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional. *Meraja Journal*. 1(3). 55-65.
- Juliari, A. (2018). Kinerja Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *SNKN*. 934-957
- Supartini, S., Kurniawati, S. B., Shandra, A. A. (2020). Pengaruh Kualitas Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Menuju Tata Pemerintahan yang Akuntabel. *Jurnal Widya Ganecwara*. 10(4). 1-14.
- Hamzah, A. P., Irawan, S. A., Wisnu, E., Roza, H., Purwanti, L., Rahmawati, Kalangi, L., Solahudin, D., Solihin, A., & Sari, D. Y. (2014). *Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Hamzah, A. P., & Kustiani, N. A. (2014). *Dasar-dasar Akuntansi Pemerintahan*. Tangerang Selatan: STAN Press.
- Mulyana, B. (2014). *Buku Seri Akuntansi Pemerintah: Akuntansi Pemerintah Daerah*. Tangerang Selatan: STAN Press.
- Pide, A. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. Bogor: Azkiya Publishing.
- Rusmana, O., Setyaningrum, D., Yuliansyah, & Maryani. (2017). *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 36 tahun 2016 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Agustiyanti (18 Maret 2020). *Sri Mulyani Relokasi Anggaran Rp 27 Triliun untuk Penanganan Corona*. Diakses tanggal 14 Desember 2021 dari <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5e9a4213c51e6/sri-mulyani-relokasi-anggaran-rp-27-triliun-untuk-penanganan-corona>

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (n.d.). *Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)*. Diakses tanggal 17 Maret 2022, dari <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Informasi APBN 2021: Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi*. Diakses pada tanggal 14 Desember 2020, dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf>